



# **RENCANA KERJA (RENJA)**



**BADAN PENDAPATAN  
DAERAH**

**PROVINSI SULAWESI  
TENGAH**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini. Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026.

Untuk mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, terjadinya peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja.

Rencana Kerja ( RENJA ) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institut pemerintah maupun mitra kerja.

Palu, 2023  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Drs. RIFKIANATA MUSTAQIM, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 19670727198603 1 005**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
 <b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat.....	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD.....	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal OPD .....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .....	28
 <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	34
3.3 Program dan Kegiatan.....	34
 <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	
	<b>44</b>
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	
	<b>52</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Uraian</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)* .....	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2020 dan Prakiraan 2021-2022.....	18
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 .....	21
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah.....	36
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode 2023 .....	45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Selain itu, Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja Bapenda harus mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa mengacu kepada peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
  9. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (lembaran daerah provinsi sulawesi tengah tahun 2016 nomor 88, tambahan lembaran daerah provinsi sulawesi tengah nomor 74);
  10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Provinsi;

11. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf BAPENDA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam pengelolaan pendapatan daerah;
2. Kerangka dasar bagi BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah;
3. Memudahkan aparatur BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun menyampaikan Laporan Kinerja BAPENDA atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terukur, dan bertanggungjawab.

Adapun tujuan disusunnya Renja BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan Perencanaan Pengelolaan Pendapatan daerah dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
2. Tersusunnya rencana program dan kegiatan yang berbasis pengendalian, monitoring dan evaluasi, berorientasi pada hasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan;
3. Menyatukan persepsi, sikap dan pandangan serta komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 tersusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat

Daerah Bab V Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran belanja sebesar Rp. 72.904.214.122,58 dengan rincian belanja tidak langsung Rp. 43.928.116.787,58 dan belanja langsung Rp. 28.976.097.335,00. Anggaran belanja yang terealisasi pada tahun 2020 sebesar Rp. 68.250.427.660,64 atau 93,62% dari nilai yang dianggarkan.

Selisih Lebih Anggaran (SILPA) pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.653.786.461,94 atau 6,38% yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.634.490.138,58 dan belanja langsung sebesar Rp. 3.019.296.323,36. Adapun hal-hal yang menyebabkan SILPA yaitu :

1. Sisa gaji untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan tambahan penghasilan dan adanya ASN yang telah pensiun/meninggal dunia
2. Selisih biaya hotel, transportasi dan lumpsum perjalanan dinas dalam dan luar daerah
3. Pengalokasian belanja yang tidak terukur pada belanja jasa kantor seperti listrik, telpon dan lainnya
4. Sisa kontrak, negosiasi harga barang, penawaran pihak pelaksana pekerjaan dan penawaran pihak penyedia jasa pengadaan
5. Adanya potongan absensi pada belanja honorarium ASN dan Non ASN .

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)\* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat  
Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)\* Tahun 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2020)	Realisasi capaian Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Ket
					Target Renja PD tahun n-2	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi (t-n)						
					2020	2021	2021						
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = 5+7+10	12 = 11/4	13	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:	Tingkat layanan Administrasi Perkantoran		75%									
	1 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa pelayanan Perkantoran		75%									
	2 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		75%									
	3 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		75%									
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan sarana dan Prasarana Aparatur		80%									
	1 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur		80%									
	2 Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur operasional SKPD	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Aparatur Operasional SKPD		80%									
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Sumberdaya Aparatur yang berkualitas		75%									
	1 Pengelolaan Kepegawaian	Terselenggaranya Pengelolaan Kepegawaian		75%									
	2 Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Tersedianya Sumberdaya Aparatur yg berkualitas		75%									
	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan dan Asset berbasis Akrual		Laporan									
	1 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Revaluasi/ Appraisal Asset/ Barang SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Asset		2 Laporan									

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 = (7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11 = 5+7+10</b>	<b>12 = 11/4</b>	<b>13</b>
	Program Evaluasi dan Perencanaan Penganggaran	Terlaksananya Evaluasi Program dan Perencanaan Anggaran		Dokumen								
	1 Penyusunan Rencana Anggaran dan Evaluasi Laporan Program/Kegiatan SKPD	Tersusunnya Program/Kegiatan dan Anggaran SKPD		2 Dokumen								
	Program Pengelolaan Pajak Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah		Target Pajak Daerah								
	1 Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah	Terlaksananya pengelolaan Pajak daerah		Target Pajak Daerah								
	2 Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah	Terselenggaranya Penetapan dan Keberatan Pajak		1 Dokumen								
	3 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	Tersedianya Laporan Pajak Daerah		1 Dokumen								
	Program Retribusi, Dana Bagi Hasil Pusat dan Pendapatan Lain-Lain	Meningkatkan Retribusi Daerah, DBH Pusat dan PLL		Target Reribusi, PLL								
	1 Pengelolaan Retribusi dan PLL	Terealisirnya Penerimaan Retribusi dan PLL		Target Reribusi, PLL								
	2 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pusat	Terealisirnya Penerimaan dana Bagi Hasil Pusat		1 Dokumen								
	3 Pengelolaan Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan PLL	Tersedianya Laporan Retribusi Daerah dan PLL		1 Dokumen								
	Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan	Terselenggaranya Pengawasan dan pembinaan pengelolaan pendapatan asset, keuangan dan personil		Laporan								
	1 Pengawasan Keuangan, Asset dan Personil Pengelolaan Pajak dan Retribusi	Terlaksananya pengawasan keuangan, asset dan personil		1 Laporan								
	2 Pembinaan Teknis Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan	Terlaksananya pembinaan pengelolaan pendapatan daerah		1 Laporan								
	3 Pengelolaan Penertiban dan Penegakkan Hukum	Terlaksananya penertiban dan penegakkan Hukum		1 Laporan								

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
	Program Pengembangan Pendapatan Sistem Informasi dan Pengolahan Data	Terselenggaranya Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, dan Pengolahan Data		Laporan								
	1 Pengembangan dan Penetapan Pendapatan	Tersedianya Data Sumber Pendapatan		1 laporan								
	2 Sistem Informasi dan pengolahan Data	Tersedianya Informasi dan Laporan Pendapatan Daerah		1 laporan								
	3 Hukum dan Perundang-undangan	Tersedianya Produk Hukum sesuai Perundang-undangan		1 laporan								
	<b>UPTB WIL. I PALU</b>											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								
	<b>UPTB WIL. II PARIMO</b>											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								
	<b>UPTB WIL. III POSO</b>											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								
	<b>UPTB WIL. IV MOROWALI</b>											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
	UPTB WIL. V BANGGAI											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Peremilharan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								
	UPTB WIL. VI BANGKEP											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Peremilharan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
	UPTB WIL. VII TOLITOLI											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisinya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								
	UPTB WIL. VIII BUOL											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisinya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								
	UPTB WIL. IX TOUNA											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisinya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=7/6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11=5+7+10</b>	<b>12=11/4</b>	<b>13</b>
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								
	<b>UPTB WIL. X DONGGALA</b>											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisinya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								
	<b>UPTB WIL. XI SIGI</b>											
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah		Target PKB BBN-KB								
	1 Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Terealisinya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		Target PKB BBN-KB								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur		80%								

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>											
	1 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran		80%								
	2 Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%								
5.02.04	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Persentase PAD terhadap Pendapatan	30,57 %		28,34 %	30,82 %	108,73 %	30,47 %	16,49 %	58,69 %	191,98 %	
5.02.04.1.01	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Persentase Capaian Penyelenggaran Pengelolaan Pendapatan	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	100,00 %	9 Dokumen	9 Dokumen	18 Dokumen	200,00 %	
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	100,00 %	18 Dokumen	18 Dokumen	36 Dokumen	200,00 %	
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	100,00 %	16 Dokumen	16 Dokumen	32 Dokumen	200,00 %	
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	100,00 %	16 Dokumen	16 Dokumen	32 Dokumen	200,00 %	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Putang Pajak.	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	100,00 %	11 Dokumen	11 Dokumen	22 Dokumen	200,00 %	
	~ UPT Wil I Palu		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
	~ UPT Wil II Parimo		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
	~ UPT Wil III Poso		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
	~ UPT Wil IV Morowali		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
	~ UPT Wil V Banggai		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
	~ UPT Wil VI Bangkep		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
	~ UPT Wil VII Tolitoli		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
	~ UPT Wil VIII Buol		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
	~ UPT Wil IX Toua		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
	~ UPT Wil X Donggala		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
	~ UPT Wil XI Sigi		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak	Jumlah Dokumen hasil pengawasan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=(7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11=5+7+10</b>	<b>12=11/4</b>	<b>13</b>
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66,50 %		68,676,807,570	59,156,716,879	86%	64,50 %	55.39 %			
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %	4 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen		
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100.00 %	3 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	200,00 %	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.00 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	200,00 %	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan			12 Laporan	12 Laporan	100.00 %	12 Laporan	12 Laporan	24 Laporan		
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270 Orang/Bulan		12 Laporan	12 Laporan	100.00 %	270 Orang/Bulan	270 Orang/Bulan	270 Orang/Bulan	270 Orang/Bulan	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian										
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan									
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendapatan Retribusi Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	100.00 %	10 Dokumen	10 Dokumen	14 Dokumen		
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	200,00 %	
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	200,00 %	
5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.00 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	200,00 %	
5.02.01.1.04.04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2 Dokumen		1 Laporan	1 Laporan	100.00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	200,00 %	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan			3 Laporan	1 Laporan	100.00 %	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	200,00 %	
5.02.01.1.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan	1 Dokumen		1 Laporan	1 Laporan	100.00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00 %	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		1 Laporan	1 Laporan	100.00 %	3 Orang	3 Orang	4 Orang	200,00 %	
5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		1 Laporan	1 Laporan	100.00 %	50 Orang	50 Orang	51 Orang	200,00 %	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=5+7+10	12=11/4	13
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			1 Laporan	1 Laporan	100.00 %	17 Laporan	17 Laporan	18 Laporan		
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa										
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 Paket		44 Paket	44 Paket	100.00 %	44 Paket	44 Paket	88 Paket	200,00 %	
	- Badan Pendapatan Daerah		6 Paket		6 Paket	6 Paket	100.00 %	6 Paket	6 Paket	12 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil I Palu		3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.00 %	3 Paket	3 Paket	6 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil II Parimo		3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.00 %	3 Paket	3 Paket	6 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil III Poso		5 Paket		5 Paket	5 Paket	100.00 %	5 Paket	5 Paket	10 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil IV Morowali		3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.00 %	3 Paket	3 Paket	6 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil V Banggai		2 Paket		2 Paket	2 Paket	100.00 %	2 Paket	2 Paket	4 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil VI Bangkep		3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.00 %	3 Paket	3 Paket	6 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil VII Tolloli		4 Paket		4 Paket	4 Paket	100.00 %	4 Paket	4 Paket	8 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil VIII Bolu		3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.00 %	3 Paket	3 Paket	6 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil IX Touba		5 Paket		5 Paket	5 Paket	100.00 %	5 Paket	5 Paket	10 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil X Donggala		3 Paket		3 Paket	3 Paket	100.00 %	3 Paket	3 Paket	6 Paket	200,00 %	
	- UPT Wil XI Sigi		4 Paket		4 Paket	4 Paket	100.00 %	4 Paket	4 Paket	8 Paket	200,00 %	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		7 Paket	7 Paket	100.00 %	7 Paket	7 Paket	14 Paket	280,00 %	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.00 %	4 Laporan	4 Laporan	8 Laporan	200,00 %	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			1 Laporan	1 Laporan	100.00 %	4 Laporan	4 Laporan	5 Laporan		
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		9 Unit	7 Unit	77,78 %	3 Unit	3 Unit	10 Unit	250,00 %	
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit		9 Paket	9 Paket	100.00 %	9 Paket	9 Paket	18 Paket	200,00 %	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian			1 Laporan	1 Laporan	97,17 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Laporan									
	- Badan Pendapatan Daerah		1 Laporan		5 Paket	5 Paket	100.00 %	1 Paket	1 Paket	6 Paket		
	- UPT Wil I Palu		1 Laporan		3 Paket	3 Paket	100.00 %	1 Paket	1 Paket	4 Paket		
	- UPT Wil II Parimo		1 Laporan		2 Paket	2 Paket	100.00 %	1 Paket	1 Paket	3 Paket		
	- UPT Wil III Poso		1 Laporan		6 Paket	6 Paket	100.00 %	1 Paket	1 Paket	7 Paket		
	- UPT Wil IV Morowali		1 Laporan		5 Paket	5 Paket	100.00 %	1 Paket	1 Paket	6 Paket		
	- UPT Wil V Banggai		1 Laporan		6 Paket	6 Paket	100.00 %	1 Paket	1 Paket	7 Paket		
	- UPT Wil VI Bangkep		1 Laporan		5 Paket	5 Paket	100.00 %	1 Paket	1 Paket	6 Paket		
	- UPT Wil VII Tolloli				4 Paket	4 Paket	100.00 %	0 Paket	0 Paket	4 Paket		
	- UPT Wil VIII Bolu		1 Laporan		3 Paket	3 Paket	100.00 %	1 Paket	1 Paket	4 Paket		
	- UPT Wil IX Touba		1 Laporan		5 Paket	5 Paket	100.00 %	1 Paket	1 Paket	6 Paket		
	- UPT Wil X Donggala		1 Laporan		5 Paket	5 Paket	100.00 %	1 Paket	1 Paket	6 Paket		

	- UPT Wil XI Sigi			1 Laporan	3 Paket	3 Paket	100.00 %	1 Paket	1 Paket			
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=(7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11=5+7+10</b>	<b>12=11/4</b>	<b>13</b>
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian										
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1 Laporan	1 Laporan	100.00 %	8 Laporan	8 Laporan			
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Paket		2 Paket	2 Paket		2 Paket	2 Paket			
5.02.01.1.09.06	Pernilaihan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	49 Paket		49 Paket	49 Paket	100.00 %	52 Paket	52 Paket			
	- Badan Pendapatan Daerah		4 Paket		2 Paket	2 Paket	100.00 %	4 Paket	4 Paket			
	- UPT Wil I Palu		3 Paket		2 Paket	2 Paket	100.00 %	3 Paket	3 Paket			
	- UPT Wil II Parimo		5 Paket		5 Paket	5 Paket	100.00 %	5 Paket	5 Paket			
	- UPT Wil III Poso		6 Paket		6 Paket	6 Paket	100.00 %	6 Paket	6 Paket			
	- UPT Wil IV Morowali		6 Paket		6 Paket	6 Paket	100.00 %	6 Paket	6 Paket			
	- UPT Wil V Banggai		1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.00 %	1 Paket	1 Paket			
	- UPT Wil VI Bangkép		1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.00 %	1 Paket	1 Paket			
	- UPT Wil VII Tololi		5 Paket		5 Paket	5 Paket	100.00 %	5 Paket	5 Paket			
	- UPT Wil VIII Buol		5 Paket		5 Paket	5 Paket	100.00 %	5 Paket	5 Paket			
	- UPT Wil IX Touna		5 Paket		5 Paket	5 Paket	100.00 %	5 Paket	5 Paket			
	- UPT Wil X Donggala		4 Paket		5 Paket	5 Paket	100.00 %	5 Paket	5 Paket			
	- UPT Wil XI Sigi		4 Paket		4 Paket	4 Paket	100.00 %	4 Paket	4 Paket			
5.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100.00 %	2 Paket	2 Paket			
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan			10 Paket	10 Paket	100.00 %	9 Paket	2 Paket			
	- Badan Pendapatan Daerah											
	- UPT Wil I Palu				4 Paket	4 Paket	100.00 %	4 Paket	4 Paket			
	- UPT Wil II Parimo											
	- UPT Wil III Poso											
	- UPT Wil IV Morowali											
	- UPT Wil V Banggai				2 Paket	2 Paket	100.00 %	2 Paket	2 Paket			
	- UPT Wil VI Bangkép											
	- UPT Wil VII Tololi											
	- UPT Wil VIII Buol				1 Paket	1 Paket	100.00 %					
	- UPT Wil IX Touna											
	- UPT Wil X Donggala				2 Paket	2 Paket	100.00 %	2 Paket	2 Paket			
	- UPT Wil XI Sigi				1 Paket	1 Paket	100.00 %	2 Paket	1 Paket			

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sesuai table berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2019-2020 dan Prakiraan 2021-2022**

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun				Tahun			Tahun			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022*	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
1	Percentase PAD terhadap Pendapatan			28,34	28,34	30,57	31,30	30,82 %	16,49 %	30,57 %	31,30			

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Isu-isu Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

- 1) Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan asset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi.
- 3) Dana Perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat
- 4) Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat
- 5) Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk 5 tahun kedepan
- 6) Dalam Pengelolaan dan Optimalisasi asset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian asset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan

### **2.3.2 Rekomendasi dan Catatan Strategis**

- 1) Peningkatan PAD dari sisi pajak dilakukan dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan system online, pelayanan dengan bus Samsat Keliling, partisipasi pada kegiatan yang diadakan Pemda Kabupaten/Kota, Pelayanan Samsat Corner atau Outlet:
  - Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota
  - Pembebaan BBN-KB II dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga
  - Peningkatan kemampuan aparatur pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan bimtek pajak dan retribusi daerah
  - Koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk memecahkan masalah pengelolaan pendapatan di masing-masing UPTB
  - Forum komunikasi antara pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dengan dealer dalam upaya peningkatan sumbangan pihak ketiga

- Forum komunikasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah dalam upaya peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Peningkatan Optimalisasi / pemanfaatan asset pemerintah daerah sebagai sumber PAD
  - 3) Dilaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga (Untad) untuk kajian potensi Pendapatan Daerah
  - 4) Meningkatkan Pemahaman SDM melalui Bimtek

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal OPD**

Adapun perbandingan antara RKPD 2022 dengan rancangan awal usulan Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**(Tabel T-C.32 Permendagri No. 86 Tahun 2017)**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku**  
**Kepentingan Tahun 2023**

**Perangkat Daerah :Badan Pendapatan Daerah**  
**Periode / Tahun : 2023**

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>BADAN</b>		<b>PROV.SULTENG</b>			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66,50 %	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah		
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<b>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan</b>		
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270 Org/bln	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		<b>Jumlah Laporan</b>		
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	
5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	
5.02.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2 Dokumen	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>		
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	
5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>		
			<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>		

5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>		
			<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Paket	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Paket	
5.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara	2 Paket	
5.02.04	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>Persentase PAD terhadap Pendapatan</b>	<b>30,57 %</b>	
5.02.04.1.01.01	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>Persentase Capaian Penyelenggaran Pengelolaan Pendapatan</b>	<b>100 %</b>	
5.02.04.1.01.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	9 Dokumen	
5.02.04.1.01.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	18 Dokumen	
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Dokumen	
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	16 Dokumen	
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	16 Dokumen	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen hasil pengawasan	1 Dokumen	
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
UPT Wilayah I Palu		<b>Kota Palu</b>			
5.02.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>		
			<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>		
			<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Paket	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah paket pemeliharaan		
5.02.04	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				
5.02.04.1.01	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertingginya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	

1	2	3	4	5	6
<b>UPT Wilayah II Parimo</b>		<b>Kab. Parimo</b>			
5.02.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Paket	
5.02.04	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				
5.02.04.1.01	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	
<b>UPT Wilayah III Poso</b>		<b>Kab. Poso</b>			
5.02.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Paket	
5.02.04	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				
5.02.04.1.01	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Laporan	
<b>UPT Wilayah IV Morowali</b>		<b>Kab. Morowali &amp; Kab. Morowali Utara</b>			
5.02.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	

1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Paket	
5.02.04	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				
5.02.04.1.01	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	
<b>UPT Wilayah V Banggai</b>		Kab. Banggai			
5.02.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Paket	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah paket pemeliharaan	\	
5.02.04	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				
5.02.04.1.01	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	
<b>UPT Wilayah VI Bangkep</b>		Kab. Bangkep dan Kab Banggai Laut			
5.02.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	

1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Paket	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	
<b>UPT Wilayah VII Toli-toli</b>		<b>Kab. Toli-Toli</b>			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Paket	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah paket pemeliharaan		
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	
<b>UPT Wilayah VIII BUOL</b>		<b>Kab. Buol</b>			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Paket	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah paket pemeliharaan		

1	2	3	4	5	6
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	
<b>UPT Wilayah IX Tojo Una-una</b>		Kab. Tojo Una-una			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Paket	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah paket pemeliharaan		
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	
<b>UPT Wilayah X Donggala</b>		Kab. Donggala			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Paket	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah paket pemeliharaan		
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah				

5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	
1	2	3	4	5	6
UPT Wilayah XI Sigi		Kab. Sigi			
5.02.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>		
			<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>		
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>		
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>		
			<b>Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Paket	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah paket pemeliharaan		
5.02.04	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				
5.02.04.1.01	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

I. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, dimana terdapat 2 Program dan 21 Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Admininstrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan:

- Pengelolaan Pendapatan Daerah

II. Rencana Kerja 11 Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, dimana terdapat 2 Program dan 4 Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan:

- Admininstrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan:

- Pengelolaan Pendapatan Daerah

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 84 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

##### **1.) Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris merupakan unsur yang membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis program, kepegawaian dan umum serta keuangan dan asset kepada semua unsur dilingkungan kerja dan unit kerja terkait pada Badan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan kebijakan teknis, perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan asset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
- b. Mendistribusikan tugas dan petunjuk atas perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan asset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
- c. Menyelenggarakan teknis operasional perencanaan dan evaluasi program, pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan asset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, pengelolaan dan

pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan aset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;

- e. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan administrasi perlengkapan dan umum, kepegawaian, keuangan dan aset guna kelancaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

## **2.) Bidang Pengembangan, Sistem Informasi, dan Pengelohan Data**

Bidang Pengembangan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang- undangan.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan;
- e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan

bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan, Sistem Informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan;

- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data.

### **3.) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah**

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan penerimaan pajak daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah; penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- e. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Pajak Daerah, Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, dan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan

g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pajak Daerah.

#### **4.) Bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat**

Bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain dengan pihak dan unit terkait;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- f. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Pusat, Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- h. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pusat.

### **5.) Bidang Pengawasan dan Pembinaan**

Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Pengawasan Keuangan, Asset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum.

Dalam penyelenggaraan Bidang Pengawasan dan Pembinaan, mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program teknis operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- e. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil, Pembinaan Teknik Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penertiban dan Penegakan Hukum;
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengawasan dan Pembinaan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Tujuan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu terwujudnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan guna mendukung kemandirian fiskal daerah

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sesuai tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**(Tabel T-C.33 Permendagri No. 86 Tahun 2017)**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.02.	KEUANGAN								84,912,842,604.00
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROV.SULTENG	66,50 %	77,324,053,660.00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			81,533,518,089.00
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah							3,661,665,976.00
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah		3 Dokumen	826,122,456.00			3 Dokumen	826,122,456.00
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	2,835,543,520.00			1 Laporan	2,835,543,520.00
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan							62,500,000,000.00
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		270 Org/bln	54,404,795,996.00			270 Orang / Bulan	62,500,000,000.00
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan							1,072,279,585.00
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		2 Dokumen	206,812,150.00			2 Dokumen	206,812,150.00
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		2 Dokumen	181,896,970.00			2 Dokumen	181,896,970.00
5.02.01.1.04.03	Penyalinan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyalinan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		4 Laporan	314,575.00			4 Laporan	314,575,000.00
5.02.01.1.04.04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		2 Dokumen	368,995,465.00			2 Dokumen	368,995,465.00
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							1,386,867,550.00
5.02.01.1.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	785,292,400.00			1 Dokumen	785,292,400.00
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Orang	164,941,000.00			4 Orang	164,941,000.00
5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	436,634,150.00			100 Orang	436,634,150.00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Paket	128,396,092.00			6 Paket	128,396,092.00
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan		7 Paket	494,170,800.00			4 Paket	494,170,800.00
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	646,872,873.00			4 Laporan	646,872,873.00
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							6,584,458,727.00
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 Unit	627,730,607.00			6 Unit	627,730,607.00
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		9 Paket	5,956,728,120.00			9 Unit	5,956,728,120.00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							3,293,955,086.00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	7,693,955,086.00			1 Laporan	3,293,955,086.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		2 Paket	49,501,400.00			2 Paket	49,501,400.00
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		4 Paket	718,200,000.00			4 Paket	718,200,000.00
5.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara		2 Paket	797,150,000.00			2 Paket	797,150,000.00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			3,379,324,515.00
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaran Pengelolaan Pendapatan							3,379,324,515.00
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		9 Dokumen	605,552,850.00			9 Dokumen	605,552,850.00
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah		18 Dokumen	367,769,000.00			18 Dokumen	367,769,000.00
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis		1 Dokumen	576,523,650.00			1 Dokumen	576,523,650.00
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		16 Dokumen	561,105,350.00			16 Dokumen	561,105,350.00
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		16 Dokumen	262,362,800.00			16 Dokumen	262,362,800.00
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pengawasan		1 Dokumen	385,284,675.00			1 Dokumen	385,284,675.00

5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						1 Laporan	420,726,190.00
5.02.04.1.01.14		Jumlah Laporan Perembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						1 Laporan	200,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>UPT Wilayah I Palu</b>		<b>Kota Palu</b>						<b>2,474,351,547.00</b>
5.02.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			<b>1,834,774,197.00</b>
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							<b>1,070,951,270.00</b>
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	1,070,951,270.00			3 Paket	1,070,951,270.00
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							<b>585,003,627.00</b>
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	585,003,627.00			1 Laporan	585,003,627.00
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							<b>178,819,300.00</b>
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		3 Paket	178,819,300.00			3 Paket	178,819,300.00
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan							-
5.02.04	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>					Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			<b>639,577,350.00</b>
5.02.04.1.01	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>								<b>639,577,350.00</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	639,577,350.00			1 Dokumen	639,577,350.00
			<b>Kab. Parimo</b>						<b>1,477,211,162.00</b>
	<b>UPT Wilayah II Parimo</b>								
5.02.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			<b>1,007,226,695.00</b>
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							<b>134,125,261.00</b>
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	134,125,261.00			3 Paket	134,125,261.00
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							<b>772,731,934.00</b>
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	772,731,934.00			1 Laporan	772,731,934.00
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							<b>100,369,500.00</b>
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		5 Paket	100,369,500.00			5 Paket	100,369,500.00
5.02.04	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>					Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			<b>469,984,467.00</b>
5.02.04.1.01	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>								<b>469,984,467.00</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	469,984,467.00			1 Dokumen	<b>100,369,500.00</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>UPT Wilayah III Poso</b>		<b>Kab. Poso</b>							<b>1,145,639,651.00</b>
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			<b>640,005,384.00</b>
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							<b>184,625,384.00</b>
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	184,625,384.00			3 Paket	184,625,384.00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							<b>367,200,000.00</b>
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	367,200,000.00			1 Laporan	367,200,000.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							<b>88,180,000.00</b>
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		6 Paket	88,180,000.00			6 Paket	88,180,000.00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			<b>505,634,267.00</b>
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah								<b>505,634,267.00</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Laporan	505,634,267.00			1 Laporan	505,634,267.00
<b>UPT Wilayah IV Morowali</b>		<b>Kab. Morowali &amp; Kab. Morowali Utara</b>							<b>938,951,918.00</b>
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			<b>461,465,918.00</b>
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							<b>60,202,967.00</b>
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	60,202,967.00			3 Paket	60,202,967.00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							<b>324,818,331.00</b>
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	324,818,331.00			1 Laporan	324,818,331.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							<b>76,444,620.00</b>
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		6 Paket	76,444,620.00			6 Paket	76,444,620.00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			<b>477,486,000.00</b>
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah								<b>477,486,000.00</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	477,486,000.00			1 Dokumen	477,486,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kab. Banggai						1,378,523,303.00
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			858,080,341.00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							157,953,310.00
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	157,953,310.00			2 Paket	157,953,310.00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							619,788,681.00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	619,788,681.00			1 Laporan	619,788,681.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							80,338,350.00
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		1 Paket	80,338,350.00			1 Paket	80,338,350.00
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan							
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			520,442,962.00
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah								520,442,962.00
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	520,442,962.00			1 Dokumen	520,442,962.00
			Kab. Bangkep dan Kab Banggai Laut						-
									1,025,963,701.00
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			429,413,634.00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							48,417,764.00
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	48,417,764.00			3 Paket	48,417,764.00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							313,185,870.00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	313,185,870.00			1 Laporan	313,185,870.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							67,810,000.00
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		1 Paket	67,810,000.00			1 Paket	67,810,000.00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			596,550,067.00
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah								596,550,067.00
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	596,550,067.00			1 Dokumen	596,550,067.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>UPT Wilayah VII Tololi</b>		Kab. Tololi						1,155,931,535.00
5.02.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			637,984,535.00
5.02.01.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							155,731,020.00
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	155,731,020.00			4 Paket	155,731,020.00
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							312,445,598.00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			312,445,598.00			1 Laporan	312,445,598.00
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							169,807,917.00
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		5 Paket	169,807,917.00			5 Paket	169,807,917.00
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.04	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>								517,947,000.00
5.02.04.1.01	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>								517,947,000.00
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	517,947,000.00			1 Dokumen	517,947,000.00
	<b>UPT Wilayah VIII BUOL</b>		Kab. Buol						723,332,897.00
5.02.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			321,130,097.00
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							186,933,724.00
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	186,933,724.00			3 Paket	186,933,724.00
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							96,427,873.00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	96,427,873.00			1 Laporan	96,427,873.00
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							37,768,500.00
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		5 Paket	37,768,500.00			5 Paket	37,768,500.00
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			
5.02.04	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>								402,202,800.00
5.02.04.1.01	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>								402,202,800.00
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	402,202,800.00			1 Dokumen	402,202,800.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>UPT Wilayah IX Tojo Una-una</b>		Kab. Tojo Una-una						<b>1,040,275,024.00</b>
5.02.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			<b>512,381,224.00</b>
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							<b>122,716,224.00</b>
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	122,716,224.00			5 Paket	122,716,224.00
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							<b>268,800,000.00</b>
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	268,800,000.00			1 Laporan	268,800,000.00
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							<b>120,865,000.00</b>
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		5 Paket	120,865,000.00			5 Paket	120,865,000.00
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan							
5.02.04	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>					Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			<b>527,893,800.00</b>
5.02.04.1.01	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>								<b>527,893,800.00</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	527,893,800.00			1 Dokumen	527,893,800.00
			Kab. Donggala						<b>1,001,635,623.00</b>
5.02.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			<b>722,729,723.00</b>
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							<b>447,372,650.00</b>
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	447,372,650.00			3 Paket	447,372,650.00
5.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							<b>162,607,073.00</b>
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	162,607,073.00			1 Laporan	162,607,073.00
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							<b>112,750,000.00</b>
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		4 Paket	112,750,000.00			4 Paket	112,750,000.00
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan							
5.02.04	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>					Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			<b>278,905,900.00</b>
5.02.04.1.01	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>								<b>278,905,900.00</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	278,905,900.00			1 Dokumen	278,905,900.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UPT Wilayah XI Sigi		Kab. Sigi						1,309,001,460.00
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			1,003,481,460.00
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							352,183,200.00
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa							
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	352,183,200.00			4 Paket	352,183,200.00
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							594,898,260.00
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	594,898,260.00			1 Laporan	594,898,260.00
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian							56,400,000.00
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		4 Paket	56,400,000.00			4 Paket	56,400,000.00
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan							
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			305,520,000.00
5.02.04.1.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah								305,520,000.00
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		1 Dokumen	305,520,000.00			1 Dokumen	305,520,000.00

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah beserta 11 UPT Pendapatan Se-Sulteng akan melaksanakan program dan kegiatan seperti tercantum pada tabel berikut:

**TABEL 4.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Periode 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2023					
						Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah											
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		66,50 %	77,324,053,660.00				
		5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah							
		5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah		3 Dokumen	826,122,456.00	Sekretariat (Prog)	Provinsi		
		5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	2,835,543,520.00	Sekretariat (Keu)	Provinsi		
		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan							
		5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		270 Org/bln	54,404,795,996.00	Sekretariat (Keu)	Provinsi		

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		5.02.01.1.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan					
		5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		2 Dokumen	206,812,150.00	<b>Bid. Non Pajak</b>	<b>Provinsi</b>
		5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		2 Dokumen	181,896,970.00	<b>Bid. Non Pajak</b>	<b>Provinsi</b>
		5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		1 Laporan	314,575.00	<b>Bid. Wasbin</b>	<b>Provinsi</b>
		5.02.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		2 Laporan	368,995,465.00	<b>Bid. Non Pajak</b>	<b>Provinsi</b>
		<b>5.02.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>					
		5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	785,292,400.00	<b>Sekretariat (Kepeg)</b>	<b>Provinsi</b>
		5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Org	164,941,000.00	<b>Sekretariat (Kepeg)</b>	<b>Provinsi</b>
		5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	436,634,150.00	<b>Bid. Pengembangan</b>	<b>Provinsi</b>
		<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>					
				<b>Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>					
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					
			~ Bapenda			6 Paket	128,396,092.00	<b>Sekretariat</b>	
			~ UPT Wil I Palu			3 Paket	1,070,951,270.00		<b>Kota Palu</b>
			~ UPT Wil II Parimo			3 Paket	134,125,261.00		<b>Kab Parimo</b>
			~ UPT Wil III Poso			5 Paket	184,625,384.00		<b>Kab Poso</b>
			~ UPT Wil IV Morowali			3 Paket	60,202,967.00		<b>Kab Morowali &amp; Morut</b>

--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			~ UPT Wil V Banggai			2 Paket	157,953,310.00		Kab Banggai
			~ UPT Wil VI Bangkep			3 Paket	48,417,764.00		Kab Bangkep & Banggai Laut
			~ UPT Wil VII Tolitoli			4 Paket	155,731,020.00		Kab Tolitoli
			~ UPT Wil VIII Buol			3 Paket	186,933,724.00		Kab Buol
			~ UPT Wil IX Touba			5 Paket	122,716,224.00		Kab Touba
			~ UPT Wil X Donggala			3 Paket	447,372,650.00		Kab Donggala
			~ UPT Wil XI Sigi			4 Paket	352,183,200.00		Kab Sigi
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			7 Paket	494,170,800.00	Sekretariat	Provinsi
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4 Laporan	646,872,873.00	Sekretariat	Provinsi & Luar Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian						
	5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			3 Unit	627,730,607.00	Sekretariat	Provinsi
	5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			9 Paket	5,956,728,120.00	Sekretariat	Provinsi
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian						
	5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
		~ Bapenda				1 Laporan	7,693,955,086.00	Sekretariat	
		~ UPT Wil I Palu				1 Laporan	585,003,627.00		Kota Palu
		~ UPT Wil II Parimo				1 Laporan	772,731,934.00		Kab Parimo
		~ UPT Wil III Poso				1 Laporan	367,200,000.00		Kab Poso
		~ UPT Wil IV Morowali				1 Laporan	324,818,331.00		Kab Morowali & Morut
		~ UPT Wil V Banggai				1 Laporan	619,788,681.00		Kab Banggai

			~ UPT Wil VI Bangkep			1 Laporan	313,185,870.00		Kab Bangkep & Banggai Laut
			~ UPT Wil VII Tolitoli				312,445,598.00		Kab Tolitoli
			~ UPT Wil VIII Buol			1 Laporan	96,427,873.00		Kab Buol
			~ UPT Wil IX Touna			1 Laporan	268,800,000.00		Kab Touna
			~ UPT Wil X Donggala			1 Laporan	162,607,073.00		Kab Donggala
			~ UPT Wil XI Sigi			1 Laporan	594,898,260.00		Kab Sigi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian					
				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		2 Paket	49,501,400.00	Sekretariat	
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					
			~ Bapenda			4 Paket	718,200,000.00	Sekretariat	
			~ UPT Wil I Palu			3 Paket	178,819,300.00		Kota Palu
			~ UPT Wil II Parimo			5 Paket	100,369,500.00		Kab Parimo
			~ UPT Wil III Poso			6 Paket	88,180,000.00		Kab Poso
			~ UPT Wil IV Morowali			6 Paket	76,444,620.00		Kab Morowali & Morut
			~ UPT Wil V Banggai			1 Paket	80,338,350.00		Kab Banggai
			~ UPT Wil VI Bangkep			1 Paket	67,810,000.00		Kab Bangkep & Banggai Laut
			~ UPT Wil VII Tolitoli			5 Paket	169,807,917.00		Kab Tolitoli
			~ UPT Wil VIII Buol			5 Paket	37,768,500.00		Kab Buol
			~ UPT Wil IX Touna			5 Paket	120,865,000.00		Kab Touna
			~ UPT Wil X Donggala			4 Paket	112,750,000.00		Kab Donggala
			~ UPT Wil XI Sigi			4 Paket	56,400,000.00		Kab Sigi
		5.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara		2 Paket	797,150,000.00	Sekretariat	
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan					
			~ Bapenda						
			~ UPT Wil I Palu						
			~ UPT Wil II Parimo						
			~ UPT Wil III Poso						
			~ UPT Wil IV Morowali						
			~ UPT Wil V Banggai						
			~ UPT Wil VI Bangkep						
			~ UPT Wil VII Tolitoli						
			~ UPT Wil VIII Buol						
			~ UPT Wil IX Touna						
			~ UPT Wil X Donggala						
			~ UPT Wil XI Sigi						

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Terwujudnya Efisiensi dan efektifitas Pengelolaan keuangan guna mendukung Kemandirian Fiskal Daerah									
	Meningkatnya kemandirian Fiskal Daerah melalui optimalisasi PAD	<b>5.02.04</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase PAD terhadap Pendapatan</b>		30,57			
		<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Penyelenggaran Pengelolaan Pendapatan</b>		100,00 %			
		5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		9 Dokumen	650.132.700	<b>Bid. Pajak</b>	<b>Provinsi</b>
		5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah		18 Dokumen	267.768.525	<b>Bid. Pengembangan</b>	<b>Provinsi</b>
		5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		1 Dokumen	449.112.375	<b>Bid. Pengembangan</b>	<b>Provinsi</b>
		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		16 Dokumen	791.094.625	<b>Bid. Pajak</b>	<b>Provinsi</b>
		5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		16 Dokumen	198.836.950	<b>Bid. Pajak</b>	<b>Provinsi</b>
		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		11 Dokumen			
			~ UPT Wil I Palu			1 Dokumen	409.593.800		<b>Kota Palu</b>
			~ UPT Wil II Parimo			1 Dokumen	195.150.000		<b>Kab Parimo</b>
			~ UPT Wil III Poso			1 Dokumen	345.386.650		<b>Kab Poso</b>
			~ UPT Wil IV Morowali			1 Dokumen	264.730.000		<b>Kab Morowali &amp;</b>
			~ UPT Wil V Banggai			1 Dokumen	429.687.100		<b>Kab Banggai</b>
			~ UPT Wil VI Bangkep			1 Dokumen	283.100.000		<b>Kab Bangkep &amp;</b>
			~ UPT Wil VII Tolitoli			1 Dokumen	385.557.350		<b>Kab Tolitoli</b>
			~ UPT Wil VIII Buol			1 Dokumen	261.000.000		<b>Kab Buol</b>
			~ UPT Wil IX Touba			1 Dokumen	226.797.600		<b>Kab Touba</b>
			~ UPT Wil X Donggala			1 Dokumen	153.146.905		<b>Kab Donggala</b>
			~ UPT Wil XI Sigi			1 Dokumen	191.080.000		<b>Kab Sigi</b>
		5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pengawasan		1 Dokumen	568.504.325	<b>Bid. Wasbin</b>	<b>Provinsi</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan program serta kegiatan SKPD. Ini menggambarkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan penyelenggaraan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah, yang secara operasional melaksanakan pemungutan pajak-pajak daerah dan beberapa obyek pendapatan lainnya, disamping mengkoordinasikan pengelolaan pendapatan daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam penyerapan dana yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan kinerja aparatur, kelembagaan, pemenuhan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta peningkatan kapasitas/kemampuan dalam pelaksanaan tugas operasional dilapangan.

Kedepan yang harus dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pendataan terhadap obyek dan subyek pungutan, peningkatan efisiensi dan efektifitas sumber daya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan, pelaksanaan koordinasi/rekonsiliasi baik dengan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, serta peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur baik melalui bimbingan teknis dalam daerah maupun luar daerah.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan

lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu,

2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Drs. RIFKIANATA MUSTAQIM, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19670727 198603 1 005